

## PENERAPAN UJI KOMPETENSI LSP-P1 DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN SISWA: PADA SISWA SMK PERWIRA BANGSA DEPOK

**Penulis** : Faisal Fahrianysyah  
**Institusi** : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
**Email Korespondensi** : faisalrahman0605@gmail.com  
**DOI** : 10.53947/perspekt.v3i2.611

### Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan karakteristik, mekanisme, serta kelebihan dan kekurangan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) di SMK Perwira Bangsa Kota Depok. Menggunakan metode kualitatif dengan desain etnografi, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSP P1 di sekolah ini menguji sertifikasi untuk siswanya sendiri dan siswa sekolah jejaring dengan kurikulum yang disinkronkan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Mekanisme sertifikasi meliputi persiapan, pelaksanaan, penerbitan sertifikat, serta pengawasan dan evaluasi sesuai pedoman BNSP. Kelebihan LSP P1 ini adalah menumbuhkan semangat siswa, menggunakan model pembelajaran *Inquiry Learning*, dan memiliki cukup asesor kompetensi. Namun, kekurangan termasuk kurangnya peralatan, tenaga administrasi, dan *surveilan* pemegang sertifikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan LSP P1 meliputi lisensi skema sertifikasi, sinkronisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana standar industri, pembiayaan, pemenuhan asesor, penyelenggaraan uji sertifikasi, serta penerbitan dan pemeliharaan sertifikat kompetensi.

**Kata Kunci:**  
*Uji Kompetensi, LSP-P1, Mutu Lulusan*

### Abstract

*This research describes the characteristics, mechanisms, and advantages and disadvantages of competency certification by the Party 1 Professional Certification Institute (LSP P1) at Perwira Bangsa Vocational School, Depok City. Using qualitative methods with an ethnographic design, data was collected through observation, interviews, and documentation. The research results show that LSP P1 at this school tests certification for its students and network school students with a curriculum synchronized with the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI). The certification mechanism includes preparation, implementation, issuance of certificates, and monitoring and evaluation according to BNSP guidelines. The advantages of LSP P1 are that it fosters student enthusiasm, uses the Inquiry Learning model, and has sufficient competency assessors. However, shortcomings include a need for more equipment, administrative personnel, and surveillance of certificate holders. This research concludes that the management of LSP P1 includes certification scheme licensing, curriculum synchronization, provision of industry-standard infrastructure, financing, compliance with assessors, implementation of certification tests, and issuance and maintenance of competency certificates.*

**Keywords:**  
*Competency Test, LSP-P1, Quality of Graduates*

## 1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan *Asean Economic Community* (AEC) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) maka penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang memungkinkan untuk persaingan sektor tenaga kerja antar negara mengharuskan pemerintah untuk segera menyiapkan tenaga kerja yang profesional yaitu sumber daya manusia yang terampil, cerdas dan kompetitif. Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan merupakan tempat untuk mewujudkannya. Kementerian Perindustrian gencar mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (*demand driven*) saat ini. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mewujudkan tenaga kerja yang profesional dibuktikan dengan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya dimana yang dimaksud sertifikat ini seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 3; Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sedangkan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pasal 89 ayat 5; Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji. Pada kenyataannya, belum semua SMK melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak pertama, dikarenakan standarisasi manajemen untuk asesmen dan peralatan yang harus memenuhi standar minimal dari persyaratan uji kompetensi suatu bidang keahlian juga menjadi perhatian utama bagi sekolah-sekolah kejuruan yang akan mendirikannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data penelitian ini meliputi : Informan atau narasumber, yang terdiri dari Kepala Sekolah, Ketua LSP P1, perwakilan Asesor kompetensi, Kepala Kompetensi Keahlian Tata Boga, perwakilan Guru Produktif Tata Boga, dan perwakilan Siswa SMK Perwira Bangsa Kota Depok. Tempat dan peristiwa/ aktivitas, yang terdiri dari kegiatan berlangsungnya Uji Sertifikasi Kompetensi Pada LSP P1, dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi. Dokumen atau arsip, berupa manajemen LSP P1, dokumen perencanaan uji sertifikasi kompetensi, dokumen pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, peraturan-peraturan, sertifikat kompetensi, agenda dan foto kegiatan. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*Interaktive Model of Analysis*).

## 2. METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

LSP P1 SMK Perwira Bangsa Kota Depok dirintis sejak tahun 2019 melalui pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tata Boga. Begitu pula keterlibatan kepala kompetensi keahlian yang berperan sebagai penanggung jawab Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah ada terlebih dahulu sebelum pembentukan LSP P1, dia bertanggungjawab dalam menentukan dan memilih skema sertifikasi sesuai dengan karakteristik TUK yang ada pada kompetensi keahliannya. Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam pendirian LSP P 1 ini memiliki sasaran yang jelas, utamanya untuk menguji siswanya sendiri dan juga siswa sekolah lain yang masuk dalam jejaring, yaitu sekolah-sekolah kejuruan sekitar yang belum memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau yang belum memiliki LSP P1, dimana dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan, diharapkan sudah menggunakan model uji sertifikasi kompetensi. Kompetensi kerja yang ada di industri, telah dimasukkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah kejuruan di dalam mata pelajaran produktif atau dalam kurikulum 2013 dikategorikan sebagai kelompok mata pelajaran peminatan C1 sebagai dasar bidang keahlian, C2 sebagai dasar program keahlian dan C3 sebagai mata pelajaran kompetensi keahlian. Untuk itu, dalam hubungannya dengan lembaga sertifikasi, maka sekolah ini melakukan sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri, yaitu antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Dasar (KD), Kompetensi Inti (KI) dengan SKKNI dan skema sertifikasi yang dikemas dalam silabus dan dijabarkan dalam materi pembelajaran teori dan praktik untuk dilaksanakan sesuai standar kompetensi di industri. Tujuan dari pendirian LSP P1 di sekolah ini sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor :2/BNSP/III/2014 bahwa LSP pihak kesatu lembaga pendidikan atau pelatihan adalah lembaga yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Lembaga sertifikasi ini sangat penting bagi sekolah sebab keberadaannya dapat meningkatkan eksistensi sekolah di masyarakat, terutama masyarakat usaha dan industri. Perusahaan dapat langsung mengenal eksistensi sekolah dari lulusannya yang menjadi tenaga kerja di tempatnya. Apa lagi jika sekolah sudah dapat menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, lembaga sertifikasi ini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. (Mohammad Sahroni.2017:38).

#### **MEKANISME SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1 DI SMK PERWIRA BANGSA KOTA DEPOK.**

- **PERSIAPAN UJI SERTIFIKASI**

Seperti pendapat Mohammad Saroni (2017:41) bahwa uji sertifikasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkatan kualifikasi seorang tenaga kerja. Sedangkan pelaksana uji sertifikasi adalah asesor dengan memiliki hak atas lisensi yang dimilikinya, yaitu dalam pelaksanaan uji sertifikasi memperoleh honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam proses kegiatan uji sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang diprasyaratkan dalam sebuah uji sertifikasi bagi siswa sekolah kejuruan. Untuk asesor, persiapan administrasi uji sertifikasi tidak membuat lagi, karena sudah dibuat pada saat pengajuan lisensi skema sertifikasi yang dinamakan MUK (Materi Uji Kompetensi) dimana di dalamnya berisi materi, penilaian dan soal pengetahuan maupun praktik dengan standar sesuai SKKNI dan

BNSP. Sebelum pelaksanaan uji sertifikasi, LSP P1 juga menyiapkan tempat uji kompetensi dalam penyiapan peralatan dan bahan uji.

## • PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI

Pelaksanaan uji sertifikasi di SMK Tirta Jaya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada hari pertama melaksanakan uji tertulis pada asesori tentang dua skema yang akan diujikan pada siswa (asesori) yaitu pengoperasian mesin bubut dasar dan pengoperasian mesin *frais* dasar serta unit kompetensi yang termuat dalam masing-masing skema, yang dilaksanakan oleh asesori yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas dan jadwal uji sertifikasi.
- 2) Hari kedua dilanjutkan ujian praktik yang dilaksanakan secara bergiliran, dimana dalam satu hari ada 3 sesi atau bergiliran dengan jumlah peserta uji setiap sesi sebanyak 4 asesori. Dikarenakan jumlah mesin bubut dan *frais* yang layak sesuai hasil verifikasi sejumlah 4 mesin. Dalam jadwal pelaksanaan setiap hari maksimal 6 – 10 asesori yang diuji oleh asesori.
- 3) Hari ketiga melanjutkan ujian praktik sesuai dengan jadwal sampai dengan selesai semua asesori telah diuji berdasarkan soal praktik yang diberikan dan telah dikerjakan dengan bukti hasil pekerjaan yang akan dinilai oleh asesori untuk menentukan kelayakan hasil kerja.
- 4) Pada akhir hari ketiga, setelah semua asesori menyelesaikan uji kompetensi, maka asesori melaksanakan verifikasi capaian nilai soal teori dan soal praktik. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan rekomendasi untuk hasil uji kompetensi berupa ‘Kompeten’ dan ‘Belum Kompeten’. Hasil rekomendasi ini diberikan kepada pihak Panitia Tempat Uji Kompetensi (PTUK).
- 5) Tahap berikutnya PTUK melaksanakan sidang keputusan/ pleno/ penegas berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi, untuk diajukan ke BNSP dalam perolehan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang memperoleh predikat kompeten. Bagi peserta yang memperoleh predikat belum kompeten, tidak mendapatkan sertifikat kompetensi dan tidak dapat mengajukan untuk uji sertifikasi lagi di LSP P1, tetapi peserta dapat mengajukan uji sertifikasi melalui LSP P3.
- 6) Selanjutnya panitia yang terdiri dari pengurus LSP atau disebut PTUK (Panitia Tempat Uji Kompetensi) melakukan evaluasi/ sidang tentang pelaksanaan uji kompetensi periode berjalan. Membahas kekurangan dan kelebihan dari hasil pelaksanaan uji kompetensi, sehingga akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi berikutnya.
- 7) Hasil sidang pleno uji kompetensi disampaikan kepada BNSP melalui jasa POS, kemudian setelah diverifikasi BNSP menerbitkan sertifikat kompetensi yang berupa Blangko yang telah terisi lengkap dengan klaster skema kompetensi yang diujikan. Blangko sertifikat dikirimkan ke LSP P1 dan diterima kemudian dilakukan penandatanganan sertifikat oleh Ketua LSP P1.
- 8) Setelah sertifikat jadi, diserahkan kepada peserta uji sertifikasi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan melamar pekerjaan atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- 9) Penggunaan sertifikat diawasi oleh pihak LSP P1, apabila disalahgunakan dapat dilakukan pembekuan.
- 10) Peserta uji dapat melakukan sertifikasi ulang dari sertifikat yang dimiliki setelah masa berlaku habis yaitu 3 tahun.

## 4. KESIMPULAN

Pembentukan LSP P1 ini memiliki tujuan untuk mensertifikasi siswa sekolah sendiri dalam bidang permesinan, selain itu juga untuk mensertifikasi sekolah di sekitarnya. Lisensi skema berlaku selama 3 tahun. Dalam mendirikan LSP P1, perlu didukung oleh kepemilikan sarana dan prasarana praktik, ruangan/kantor yang memadai dan juga sumber daya guru yang telah memiliki sertifikat asesor kompetensi. Sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri dilakukan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Dasar (KD), Kompetensi Inti (KI) dengan SKKNI dan skema sertifikasi yang dikemas dalam silabus dan dijabarkan dalam materi pembelajaran teori dan praktik untuk dilaksanakan sesuai standar kompetensi di industri. Uji sertifikasi dilaksanakan setelah semua persyaratan uji terpenuhi, dari peserta, penyiapan dokumen, verifikasi TUK, penganggaran, kesiapan asesor, panitia sampai jadwal pelaksanaan. Setelah penerbitan sertifikat kompetensi, perlu adanya pengecekan dan penjaminan mutu atas kompetensi personal pemegang sertifikat kompetensi secara periodik. SMK yang belum memiliki LSP P1 untuk mengambil kebijakan pendirian lembaga ini disekolahnya dengan mempertimbangkan segala aspek kelebihan dan kekurangannya untuk dicarikan solusi dalam menyempurnakannya.

## 5. REFERENSI

- Bambang Sumardjoko. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah menengah Kejuruan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Ivan Hanafi. 2014. Pendidikan Teknik dan Vokasional. Bandung:Refika Aditama.
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.